

**Akibat Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya Dipalsukan**

**Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2015)**

**Oleh:**

**NUSRA ARINI**

**NIM . 4001173044**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MEDAN**

**2022 M/ 1444 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

Akibat Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya Dipalsukan

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2015)

Oleh:

NUSRA ARINI  
NIM. 4001173044

Setelah Dilakukan Bimbingan Dapat Disetujui Untuk Diajukan

Untuk Mengikuti Sidang Terbuka

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag  
NIP. 19540820 198203 1 002  
NIDN. 20200085402

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Navir Yuslem, M.A.  
NIP.195808151985031007  
NIDN. 2015085801

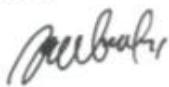
### PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul: "Akibat Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya Dipalsukan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2015)" atas Nama Nusra Arini NIM. 4001173044, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Rabu, 30 Nopember 2022.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang terbuka (Promosi Doktor) pada Program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

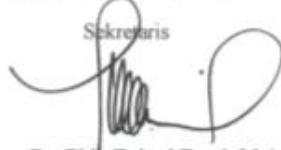
Medan, 28 Desember 2022  
Panitia Ujian Tertutup Disertasi  
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua



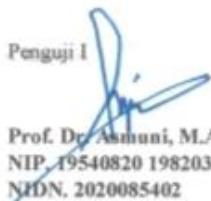
Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A  
NIP. 19620814 199203 1 003  
NIDN. 2014086201

Sekretaris



Dr. Phil. Zainul Fund, M.A  
NIP. 19670423 199403 1 004  
NIDN. 2023046703

Penguji I

  
Prof. Dr. Asmuni, M.Ag  
NIP. 19540820 198203 1 002  
NIDN. 2020085402

Anggota

Penguji II

  
Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A  
NIP. 19580815 198503 1 007  
NIDN. 2015085801

Penguji III

  
Prof. Dr. Fagar, M.A  
NIP. 19581231 198803 1 016  
NIDN. 2031125810

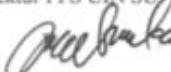
Penguji IV

  
Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., M.A  
NIP. 19791020 200901 1 010  
NIDN. 2020107903

Penguji V

  
Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H  
NIP. 19580705 198603 1 001  
NIDN. -

Mengetahui  
Direktur PPS UIN SU



Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.A  
NIP 19620814 199203 1 003  
NIDN 201486201

### Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nusra Arini

NIM : 4001173044

Tempat, Tgl Lahir: So'e, 28 Desember 1986

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jalan Meranti No.9 B Keturahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi

Dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Yang Penerapannya Dipasukan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 KAgg(2015), telah di cek Plagiasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya serta ternyata hasil plagiasi yang disampaikan tersebut tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya secara pribadi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nusra Arini

## ABSTRAK

### Akibat Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya Dipalsukan

#### Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2015)



Nama	: <b><u>NUSRA ARINI</u></b>
NIM	: <b><u>4001173044</u></b>
Prodi	: Hukum Islam
Tempat/ Tanggal Lahir	: So'e, 28 Desember 1986
Nama Orang Tua Ayah	: Drs. H. Bahrin Lubis,S.H.,M.H (alm)
Ibu	: Hj. Efri Zaidar Harahap
Pembimbing	<b><u>1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag</u></b> <b><u>2. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A</u></b>

Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan karena akan memberikan perlindungan hukum serta jaminan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang hanya memenuhi rukun dan syaratnya tanpa pencatatan. Perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan sebagaimana dalam penelitian ini merupakan perkawinan *sirri* dimana suami dan isteri secara sadar melakukan tindakan hukum berupa pemalsuan buku nikah. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah status perkawinan dengan pencatatannya yang dipalsukan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan. Ketiga, bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa pencatatan.

Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis yaitu suatu analisa data yang tidak keluar dari ruang lingkup *sample* yang bersifat teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi data yang ada hubungan dengan seperangkat yang lain. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Mataram dan narasumbernya adalah Hakim. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Semua data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: Pertama, status perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan (kasuistik) dalam perspektif hakim adalah sah dan berkekuatan hukum. Namun terdapat implikasi negatif terhadap tidak dapat terpenuhinya hak-hak istri akibat perceraian, jika Kutipan Akta Nikah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri tidak berkekuatan hukum/palsu dijadikan alat bukti pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Kedua, Hakim pada Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun akta nikahnya palsu, namun akta ini dibuat secara sadar dan diketahui bersama. Keduanya mengakui bahwa mereka telah menjalani hidup bersama sebagai suami isteri selama 21 tahun dan dokumen tersebut meskipun palsu, namun sudah mereka gunakan dalam urusan keperdataan. Adapun Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram merupakan putusan tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa akta nikah palsu, bukan

putusan yang membatalkan perkawinan dikarenakan Pengadilan Negeri bukanlah Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan itu. Adapun akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan, maka negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum mengenai status perkawinan, harta bersama dan hak-hak lainnya kecuali terdapatnya kebenaran materil yang dapat dibuktikan di persidangan.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Pencatatan yang dipalsukan, Hukum Positif, Hukum Islam*



## ABSTRACT

### Legal Consequences of Marriages Whose Registration is Falsified

#### Perspectives on Positive Law And Islamic Law

(Analysis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number  
299 K/Ag /2015)



Name	: <b>NUSRA ARINI</b>
NIM	: <b>4001173044</b>
Study Program	: Islamic Law
Place/ Date of Birth	: So'e, December 28, 1986
Father's Parents' Name	: Drs. H. Bahrin Lubis,S.H.,M.H (alm)
Mother: Hj. Efri Zaidar Harahap	
Supervisor	<b>1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag</b> <b>2. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A</b>

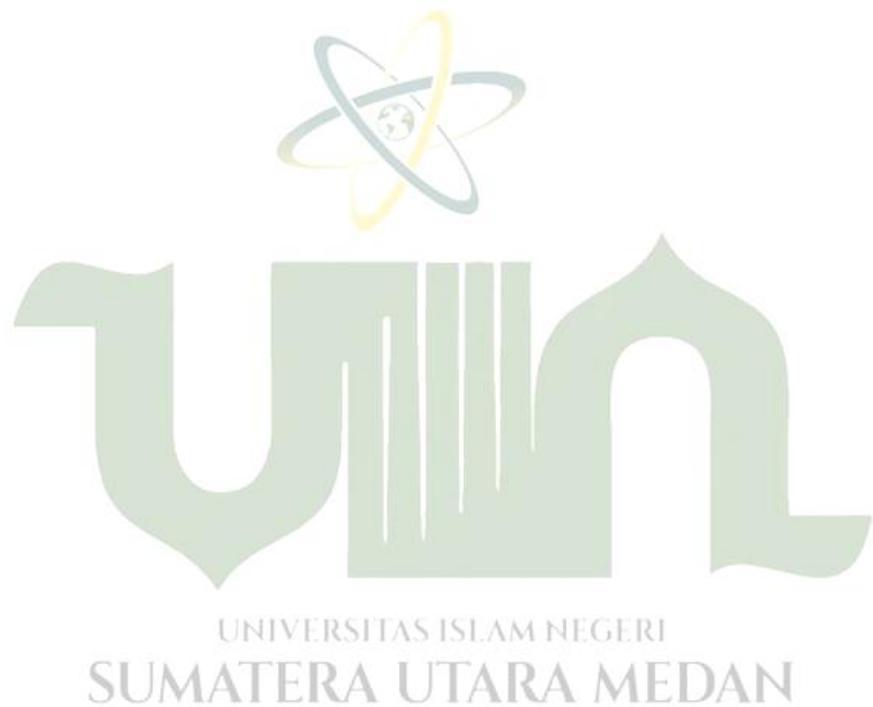
Marriage registration is important for the validity of marriage because it will provide legal protection and guarantees for rights arising from marriage. Meanwhile, an unregistered marriage is a marriage that only meets the pillars and conditions without recording. A marriage with falsified records as in this study is a *sirri* marriage in which the husband and wife consciously take legal action in the form of forgery of the marriage book. The main problem in this study is first, how is the marital status with its recording falsified by the perspective of positive law and Islamic law. Second, what is the judge's legal consideration of marriages with falsified records. Third, what are the legal consequences of an unrecorded marriage.

The research method used is descriptive analytical, which is a data analysis that does not fall outside the scope of *the sample* which is a legal theory that is generally applied to explain a set of data or show a comparison of data that has a relationship with another set. The research location is at the Mataram Religious Court and the resource person is the Judge. Data collection tools are document studies and interviews. All data are analyzed qualitatively.

Based on the results of the study shows: First, marital status with falsified (casuistry) registration in the perspective of a judge is valid and has legal force. However, there are negative implications for the non-fulfillment of the wife's rights due to divorce, if the Marriage Certificate Citation that has been terminated by the District Court is not legally valid / false as evidence in divorce cases in religious courts. Secondly, Hakim at the Religious Court in its legal considerations stated that although the marriage certificate was forged, it was made knowingly and knowingly together. The two admitted that they had lived together as husband and wife for 21 years and that the document, although fake, was already used in civil matters. The

Mataram District Court Judge in his legal considerations as corroborated by the Mataram High Court decision is a judgment on the existence of an alleged unlawful act in the form of a fake marriage certificate, not a judgment that invalidates the marriage because the District Court is not the Court that has the authority to decide it. As for the legal consequences of marriages performed without any registration, the state cannot provide legal protection regarding marital status, common property and other rights unless there is material truth that can be proved at trial.

**Keywords:** *Marriage, False Records, Positive Law, Islamic Law*



## تجريدي

### البيعات القانونية للزواج الذي تم تزويير تسجيله

#### وجهات نظر حول القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

(تحليل قرار المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ٢٠١٥/٢٩٩)



الاسم	: نصرة عرينى
نیم	٤٠٠١١٧٣٠٤٤
برنامج الدراسة	: الشريعة الإسلامية
مكان / تاريخ الميلاد	: So'e، ٢٨ ديسمبر ١٩٨٦
اسم والدي الأب	: د. ه. باهرين لوبيس، س.م.م ح (الم)
الأم	: الحاج إفري زيدار هارهاب
المشرف	١. أ.د. أسموني M.Ag ٢. أ.د. نوير يوسف ماجستير

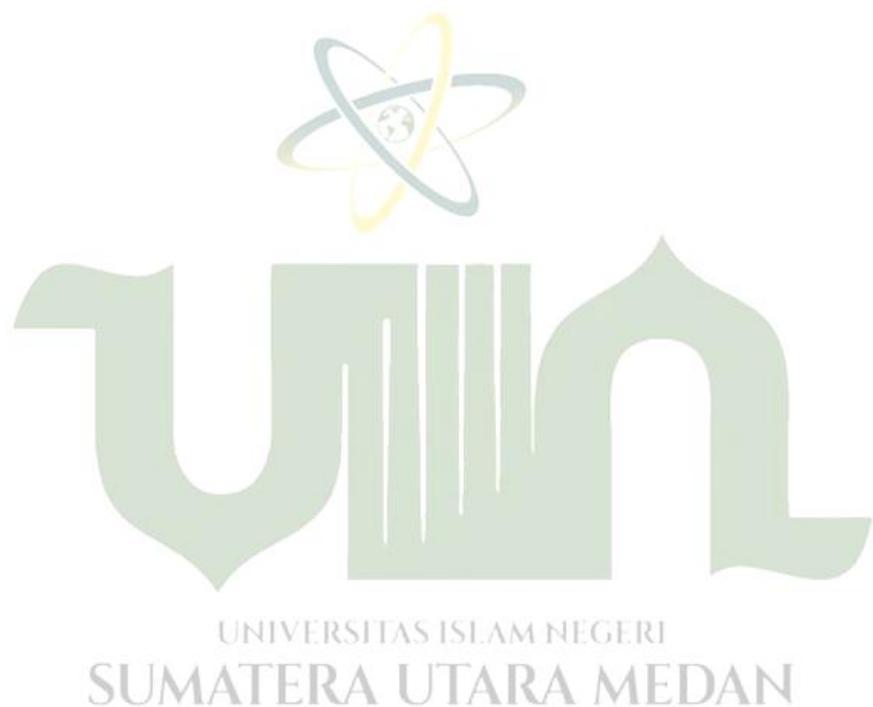
تسجيل الزواج مهم لصحة الزواج لأنه سيوفر الحماية القانونية والضمانات للحقوق الناشئة عن الزواج. وفي الوقت نفسه ، فإن الزواج غير المسجل هو زواج لا يفي إلا بالركائز والشروط دون تسجيل. الزواج بسجلات مزورة كما في هذه الدراسة هو زواج سري يتخد فيه الزوج والزوجة عن وعي إجراءات قانونية في شكل تزوير دفتر الزواج. المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة هي أولاً ، كيف يتم تزوير الحالة الاجتماعية مع تسجيلها من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. ثانياً ، ما هو الاعتبار القانوني للقاضي للزواج بسجلات مزورة. ثالثاً ، ما هي العوائق القانونية للزواج غير المسجل.

منهج البحث المستخدم هو الوصفي التحليلي وهو تحليل بيانات لا يقع خارج نطاق العينة وهو عبارة عن نظرية قانونية يتم تطبيقها بشكل عام لشرح مجموعة من البيانات أو إظهار مقارنة البيانات التي لها علاقة بمجموعة أخرى. يقع موقع البحث في محكمة ماتارام الدينية والشخص الخبير هو القاضي. أدوات جمع البيانات هي دراسات الوثائق والمقابلات. يتم تحليل جميع البيانات نوعيا.

بناء على نتائج الدراسة يظهر: أولاً ، الحالة الاجتماعية مع تسجيل مزو في منظور القاضي صالحة ولها قوة قانونية. ومع ذلك ، هناك آثار سلبية على عدم الوفاء بحقوق الزوجة بسبب الطلاق ، إذا كان الاستشهاد بشهادة الزواج التي تم إنهاؤها من قبل محكمة المقاطعة غير صالح قانونيا / كاذب كدليل في قضايا الطلاق في المحاكم الدينية. ثانياً ، ذكر H akim في المحكمة الدينية في اعتباراته القانونية أنه على الرغم من أن شهادة الزواج كانت مزورة، إلا أنها تمت عن علم وعلم معا. واعترف الاثنان بأنهما عاشا معا كزوج وزوجة لمدة ٢١ عاما وأن الوثيقة، على الرغم من أنها مزيفة، كانت تستخدم بالفعل في المسائل المدنية. قاضي محكمة ماتارام المركزية في اعتباراته القانونية كما يؤكدها قرار محكمة ماتارام العليا هو حكم بشأن

وجود فعل غير قانوني مزعوم في شكل شهادة زواج مزورة ، وليس حكماً يبطل الزواج لأن المحكمة المركزية ليست هي المحكمة التي لديها سلطة البت فيه. أما بالنسبة للعواقب القانونية للزواج الذي يتم دون أي تسجيل ، فلا يمكن للدولة توفير الحماية القانونية فيما يتعلق بالحالة الزوجية والملكية المشتركة وغيرها من الحقوق ما لم تكن هناك حقيقة مادية يمكن إثباتها في المحاكمة.

الكلمات المفتاحية : الزواج ، السجلات المزورة ، القانون الوضعي ، الشريعة الإسلامية



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka melengkapi persyaratan untuk meperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Islam jenjang Strata 3 (S3) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) penulis menyusun disertasi berjudul: “Akibat Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya Dipalsukan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/Ag/2015).”.

Untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., wakil-wakil Rektor serta seluruh civitas akademika UIN-SU Medan.
2. Direktur Pascasarjana (Ps) UIN-SU Medan bapak Prof. Dr. Hasan Bakti, M.A beserta wakil Direktur bapak Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A dan seluruh staf UIN-SU Medan.
3. Ketua Prodi Hukum Islam bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, M.. dan sekretaris Program Studi Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.
4. Bapak Prof. Dr. Asmuni, M.Ag selaku promotor I, Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A selaku promotor II yang telah banyak memberikan bimbingan maupun arahan dalam penyusunan disertasi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

7. Hakim Agung, Hakim Banding dan Hakim tingkat pertama yang telah memberi masukan dan informasi kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Mataram dan jajarannya yang telah membantu penulis selama penyusunan disertasi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan disertasi ini.
10. Kepada yang tercinta Ayah *Allahu yarham* Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H dan Mama Hj. Efri Zaidar Harahap serta Ayah Mertua *Allahu yarham* Drs. H. Achmad Busyro, S.H., M.H dan Mama Mertua Dra. Hj. Aminah yang selalu menjadi inspirasi penulis dan memberikan doa, motivasi serta dukungan agar perkuliahan dapat diselesaikan.
11. Terima kasih kepada keluarga kecilku suami tercinta Annang Achminata Hadi Eka Prasetyo, S.Kom., M.H untuk seluruh kesetiaan, dukungan dan semangat, juga kritikan dalam penulisan disertasi ini. Serta rasa bangga dan sayang kepada ananda pejuang penuntut ilmu Falza Ardhina Paramita, Fajar Ardhina Martua dan Fadlan Ardhina Halomoan yang sangat pengерian dengan perjuangan Mamanya. Begitu juga dukungan moril maupun materil dari adik-adiku. Semoga kita semua mendapat petunjuk dan inayah-Nya untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi masih dijumpai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan disertasi ini. Semoga disertasi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan tentang Hukum Islam.

Medan, 30 November 2022

Penulis,

Nusra Arini

NIM 4001173044

## DAFTAR ISI

Halaman

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	10
C. Batasan Masalah -----	10
D. Penjelasan Istilah -----	12
E. Tujuan Penelitian -----	15
F. Kegunaan Penelitian -----	16
G. Kerangka Teori-----	16
H. Kajian Terdahulu -----	28
I. Metode Penelitian -----	29
J. Sistematika Penulisan -----	33

### BAB II STATUS PERKAWINAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

A. Perkawinan dalam Hukum di Indonesia	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan -----	35
2. Tujuan dan Asas-Asas Perkawinan -----	44
3. Akibat Hukum Perkawinan -----	54
4. Kompilasi Hukum Islam sebagai Aturan Normatif Perkawinan Islam di Indonesia-----	62
B. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia	
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan -----	72
2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum di Indonesia -----	77
3. Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum -----	85
4. Pemalsuan Surat sebagai Perbuatan Melawan Hukum --	91

### BAB III EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama -----	100
B. Kewenangan Pengadilan Agama -----	108
C. Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia -----	118

D. Pencatatan Perkawinan oleh Pengadilan Agama sebagai Peradilan Islam di Indonesia -----	127
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Status Perkawinan dengan Pencatatan yang Dipalsukan Menurut Hukum di Indonesia -----	136
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkawinan dengan Pencatatan Yang Dipalsukan -----	147
C. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Perkawinan Tanpa Pencatatan -----	176
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	186
B. Saran-Saran -----	187
DAFTAR PUSTAKA -----	188

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUMATERA UTARA MEDAN**